KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gedung Baru DPR Jangan Diintervensi: KPK Siap Bagi Pengalaman
Tanggal : Rabu, 04 November 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Gedung Baru DPR Jangan Diintervensi

KPK Siap Bagi Pengalaman

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan dan anggota DPR jangan sampai mengintervensi pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengawasan mutlak diperlukan agar Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana bisa bekerja transparan dan profesional.

Hal tersebut menjadi sorotan karena DPR telah membentuk Tim Implementasi Reformasi Parlemen yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, Februari 2015. Tim itu bertugas merumuskan ketujuh langkah pengembangan kompleks Parlemen.

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan, koordinasi yang diharuskan antara setjen dan tim DPR dapat memunculkan ruang penyelewengan anggaran yang dimanfaatkan elite DPR. "Pelaksana pembangunan gedung DPR memang setjen. Namun, setjen bisa saja dikendalikan pimpinan dan anggota DPR," ujar Uchok.

Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi mutlak diperlukan sejak awal pelaksanaan proyek untuk mencegah korupsi. KPK harus memastikan, anggota dan pimpinan DPR tidak ikut campur dalam hal teknis proyek.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, bisa saja di atas kertas pelaksanaannya adalah Setjen DPR, tetapi setjen tetap harus menunggu perintah dari DPR. "Tim Implementasi Reformasi itu bisa secara tidak langsung menjadi pelaksana proyek," ujar Yenny.

Sebelumnya, saat ditemui di kompleks Parlemen, kemarin, Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, proyek pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi memang merupakan domain Setjen DPR sebagai pelaksana.

Kendati demikian, Setjen DPR tetap perlu berkoordinasi dengan Tim Implementasi Reformasi yang dibentuk DPR. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi Partai Golkar Roem Kono mengatakan, tim pembangunan di bawah Setjen DPR tetap perlu kontrol dari DPR untuk mengawal arah kebijakan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Strategis DPR. "Pimpinan tetap punya kewenangan memonitor, tetapi urusan teknis tetap diserahkan kepada kesekjenan," ujar Roem.

Terkait dengan jumlah tambahan anggaran Rp 570 miliar dalam APBN 2016, Roem menjelaskan, pemerintah menunda Rp 170 miliar dari jumlah yang awalnya diajukan Rp 740 miliar. "Kalau uang negara ada, dalam APBN Perubahan 2016 nanti akan kami ajukan kembali (pe-nundaan Rp 170 miliar itu)," ucap Roem. Adapun RAPBN-P 2016 kira-kira mulai dibahas pada Februari mendatang.

Setya meminta publik tidak mengkhawatirkan anggaran proyek pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi diselewengkan. Alasannya, tim yang dibentuk DPR tidak akan mengurus hal-hal teknis proyek, seperti tender dan proses konstruksi. Setya mempersilakan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat mengawasi jalannya proyek pembangunan.

"Sekarang sudah ada sayembara. Yang terbaik kita pilih dan serahkan ke setjen. Namun, dalam hal pembangunan nanti, sudah diwanti-wanti, itu biar diserahkan saja kepada pihak pemerintah (setjen)," kata Setya.

DPR telah selesai menyelenggarakan sayembara desain gedung baru. Pemenangnya diumumkan pada Oktober lalu, yaitu arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Gregorius Supie. Ia bekerja sama dengan PT Arkonin, anak perusahaan dari grup usaha Pembangunan Jaya. Saat *Kompas* beberapa kali menghubungi Gregorius melalui telepon kantornya, yang bersangkutan enggan berkomentar terkait proyek desain gedung baru DPR dengan alasan sedang sibuk.

Penghematan

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, DPR dapat meniru model pembangunan gedung KPK untuk menghindari potensi korupsi. KPK siap berbagi pengalaman agar DPR bisa membangun gedung baru tanpa korupsi dan transparan sejak perencanaan hingga proses konstruksi.

Adnan mengatakan, transparansi membuat pembangunan gedung KPK hemat puluhan miliar rupiah karena melibatkan tenaga ahli independen dalam menilai proses rincian desain teknik. Adnan mencontohkan, KPK menggunakan tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung untuk penilaian. "Hasilnya, kami bisa menghemat hingga 15 persen dari total rincian desain teknik gedung baru KPK senilai Rp 215 miliar," kata Adnan.

KPK juga siap membantu apabila Setjen DPR tak ingin ada yang mengintervensi untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam proyek ini. "KPK sering dimintai bantuan. Bahkan, PLN sering datang ke kami meminta semacam perlindungan jika ada yang coba mengintervensi mereka. Namun, itu semua terserah ke DPR," kata Adnan. (BIL/AGE)